

Nama : Cindi Yosari Saragih
NPM : 2213031084
Matkul : Ekonomi Industri
Kelas : 2022C

CASE STUDY

1. Penyebab kegagalan Making Indonesia 4.0 (analisis berbasis teori kebijakan industri:

Kegagalan relatif Making Indonesia 4.0 dapat dianalisis lewat kombinasi kegagalan pasar, kegagalan institusi, dan kegagalan desain kebijakan. Secara teoritis, kebijakan industri efektif jika menangani eksternalitas teknologi, spill-over, dan mengatasi hambatan koordinasi tapi implementasi 4.0 seringkali terlalu “top-down” dan generik sehingga gagal menginternalisasi konteks sektoral dan rantai nilai. Ada masalah supply-side: kesenjangan SDM teknis (keahlian digital, engineering), rendahnya kapasitas R&D/absorptive capacity perusahaan lokal, serta infrastruktur digital/logistik yang tidak merata; demand-side: permintaan domestik dan linkages ke eksportir berteknologi tinggi belum kuat; serta institutional failure: koordinasi antar-kementerian lemah, regulasi yang tumpang tindih, birokrasi dan perizinan yang memperlambat investasi, serta insentif fiskal yang tidak terikat pada hasil (mendorong rent-seeking). Dari perspektif SCP, struktur pasar (banyak usaha mikro tapi sedikit produsen besar berteknologi tinggi) menghambat adopsi skala dan efisiensi; perilaku (firm conduct) cenderung konservatif enggan investasi teknologi tanpa jaminan pasar; akhirnya performance tertekan. Singkatnya, kombinasi desain kebijakan yang terlalu ambisius tanpa fokus sektoral yang realistis, kelemahan kapasitas implementasi, dan insentif yang salah menjelaskan mengapa target 4.0 belum tercapai.

2. Perbandingan dengan Vietnam / Korea Selatan dan apa yang membedakan efektivitasnya:

Vietnam dan Korea Selatan menunjukkan efektivitas berbeda karena perbedaan sequencing, institusi, dan strategi pelaksanaan. Vietnam mengeksekusi strategi berbasis integrasi GVC: membuka diri pada FDI terarah (SEZ, kebijakan fiskal yang kompetitif), memudahkan investasi manufaktur orientasi ekspor, serta cepat membangun infrastruktur logistik dan regulasi yang relatif predictable untuk investor asing sehingga mampu menarik OEM besar (tekstil, elektronik). Vietnam juga memanfaatkan biaya tenaga kerja kompetitif sebagai entry point lalu mendorong naik kelas melalui transfer teknologi dari investor. Korea Selatan berbeda secara historis: negara melaksanakan industrial policy aktif, terfokus, jangka panjang, dengan peran negara sebagai fasilitator dan pengarah investasi, dukungan kredit terarah, pembangunan SDM vokasi, serta koordinasi erat dengan perusahaan besar (chaebol) untuk mendorong kluster teknologi. Kunci perbedaannya adalah kapasitas negara untuk merancang, mengkondisikan pasar (menginternalisasi spillovers), dan menerapkan insentif yang disiplin serta mekanisme evaluasi/penyesuaian. Indonesia cenderung kurang pada sequencing yang jelas (prioritas tanpa tahapan industrialisasi), koordinasi institusi yang kuat, dan mekanisme insentif yang terikat pada pencapaian kapasitas lokal dan linkages.

3. Rancangan kebijakan industri alternatif yang kontekstual untuk keluar dari deindustrialisasi dini (rasional & instrumen):

Usulkan strategi “selective upgrading & anchor-led clustering” yang menggabungkan pendekatan sektoral prioritas realistis, sequencing, dan instrumen yang terukur. Rasionalnya: bukan semua sektor didorong sekaligus; fokus pada subsektor dengan potensi komparatif (mis. makanan-olahan dengan nilai tambah, agro-textile untuk apparel terkemas ekspor, komponen otomotif tertentu) dan kemampuan membentuk linkages ke eksportir/global buyers. Instrumen konkret: (a) Fasilitasi

klaster kembangkan industrial park/Kawasan Industri dengan anchor tenants (vendor multinasional atau BUMN) yang diwajibkan skema local content dan program supplier development; (b) Insentif terikat kinerja insentif fiskal/akses kredit dikaitkan pada transfer teknologi, peningkatan tenaga kerja terampil lokal, dan nilai tambah lokal (sunset clause & clawback); (c) Pembiayaan terarah & dukungan investasi, kredit berbiaya rendah untuk capex modernisasi, matching grants untuk R&D dan adopsi teknologi 4.0; (d) Human capital & vocational upskilling, program pelatihan skala besar kerjasama industri-politeknik, apprenticeship dan sertifikasi kompetensi; (e) Perbaikan institusi & one-stop governance , pembentukan council nasional-daerah yang melibatkan swasta, target KPI, monitoring independen, penyederhanaan perizinan; (f) Infrastruktur dan logistic, investasi prioritas pada listrik, pelabuhan/road untuk klaster; (g) Integrasi GVC, kebijakan ekspor-promosi, standar mutu, dan diplomasi ekonomi untuk menarik OEM; (h) SME upgrading & linkages, program supplier development, fasilitasi sertifikasi, digitalisasi UMKM; (i) Regulatory certainty & anti-corruption safeguards untuk meminimalkan rent-seeking. Kebijakan ini harus dilaksanakan bertahap (pilot → evaluasi → skala), dilengkapi indikator hasil (productivity, lokal content, ekspor, R&D spending), serta mekanisme penyesuaian. Dengan fokus pada sequencing, kapasitas institusional, dan instrumen terikat hasil, Indonesia berpeluang mengubah struktur industrinya dan keluar dari jebakan deindustrialisasi dini.